

**IMPLEMENTASI *CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS,  
FISHERIES, AND FOOD SECURITY (CTI-CFF)* DI INDONESIA DAN  
FILIPINA**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin*

Oleh :

**ARI PUTRA ANUGRAH**

**E131 13 511**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2020**

HALAMAN JUDUL

IMPLEMENTASI *CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS,  
FISHERIES, AND FOOD SECURITY (CTI-CFF)* DI INDONESIA DAN  
FILIPINA

Disusun dan diajukan oleh

ARI PUTRA ANUGRAH

E 131 13 511



DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : IMPLEMENTASI *CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES, AND FOOD SECURITY (CTI-CFF)* DI INDONESIA DAN FILIPINA

NAMA : ARI PUTRA ANUGRAH

NIM : E13113511

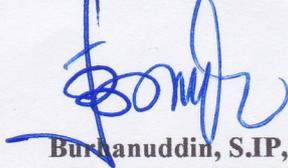
DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 26 Februari 2020

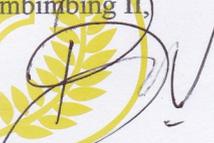
Mengetahui :

Pembimbing I,



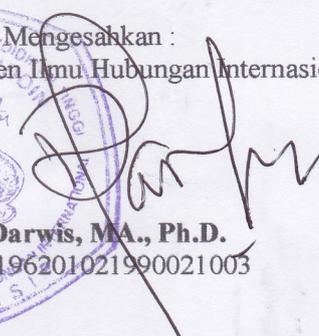
**Burhanuddin, S.IP, M.Si**  
NIP. 197602072008011009

Pembimbing II,



**Bama Andika Putra, S.IP, MIR**  
NIP. 199112172018073001

Mengesahkan :  
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,


**H. Darwis, MA., Ph.D.**  
NIP. 196201021990021003

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : IMPLEMENTASI *CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES, AND FOOD SECURITY (CTI-CFF)* DI INDONESIA DAN FILIPINA

N A M A : ARI PUTRA ANUGRAH

N I M : E13113511

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 16 Desember 2019.

TIM EVALUASI

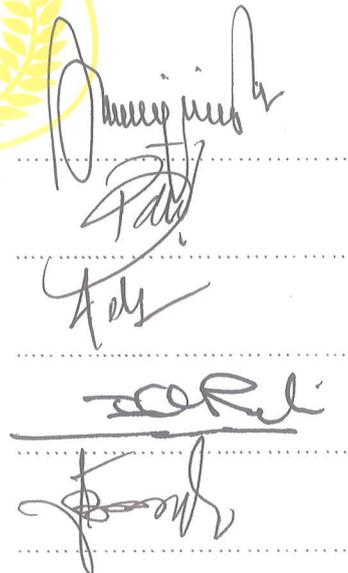
Ketua : Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

Sekretaris : Bama Andika Putra, S.IP, MIR

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

3. Burhanuddin, S.IP, M.Si



Handwritten signatures of the evaluation team members, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink on a white background with horizontal dotted lines for each name.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Putra Anugrah  
Nomor Induk : E13113511  
Judul Skripsi : Implementasi *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security* (CTI-CFF) di Indonesia dan Filipina

Bahwa benar adalah Karya Ilmiah saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi).  
Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 16 Juni 2020



Ari Putra Anugrah

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala berkat dan kesempatan yang dilimpahkan-Nya, skripsi yang berjudul **Implementasi Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) di Indonesia dan Filipina** dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis berharap agar skripsi ini selain menjadi pemenuhan kewajiban untuk meraih gelar sarjana, namun juga dapat memberi manfaat bagi pihak lain sebagai tambahan ilmu dan referensi bacaan, terutama kepada mahasiswa dan mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan hal tersebut merupakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dari penulis.

Untuk mencapai titik ini, penulis mendapatkan bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Mulai dari perkuliahan hingga penyusunan skripsi, berbagai pihak tersebut turut serta baik secara langsung dan tidak langsung dalam membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada orang tua penulis yang tercinta, Bapak **Lukman Wahab**, Almarhumah Ibu Kandung Penulis **Dudun Nuryanti**, serta Ibu Tiri saya **Hj. Muliati Tadjuddin** yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT

senantiasa melimpahkan berkah dan kasih sayang-Nya kepada mereka. Selain itu, kepada kedua saudara penulis yakni Kakak **Andy Makkaraseng** yang selalu mendorong penulis agar bersegera diri dalam menyelesaikan skripsi ini dan Almarhum Adik penulis **Andy Ranga Putra** yang senantiasa menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta tidak lupa penulis berterimakasih kepada keluarga besar penulis atas dorongan dan nasehatnya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

2. Ibu Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Dwia Aries Pulubuhu, MA.** Beserta jajarannya.
3. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Armin Arsyad** beserta jajarannya.
4. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, Bapak **H. Darwis, MA., Ph.D.** dan Bapak **Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si.** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajaran dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional lainnya, Bapak **Dr. Adi Suryadi B. MA.**, Bapak **Drs. Munjin Syafik Asyari, M.Si.**, Bapak **Drs. Patrice Lumumba, MA.**, Bapak **Muh. Nasir Badu, Ph.D.**, Bapak **Drs. Aspiannor Masrie, M.Si.**, Bapak **Ishaq Rahman, S.IP., M.Si.**, Bapak **Agussalim Burhanuddin, S.IP., MIRAP.**, Bapak **Drs. Husain Abdullah, M.Si.**, Bapak **Drs. Imran Hanafi, MA., M.Ec.**, Bapak **Aswin Baharuddin, S.IP., MA.**, Ibu **Nur Indah Idris, S.IP., MA.**, Ibu **Seniwati, Ph.D.**, Ibu **Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si.** dan Ibu **Nurjannah Abdullah S.IP., MA.** terimakasih atas

segala ilmu yang diberikan baik di dalam ruang perkuliahan ataupun di luar kelas.

5. Tim Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak **Burhanuddin, S.IP., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing I yang juga merupakan Dosen Pembimbing Akademik penulis dan Bapak **Bama Andika Putra, S.IP., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas segala arahan, ilmu dan waktu yang diluangkan dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Jajaran staf **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Departemen Ilmu Hubungan Internasional**, untuk bantuan selama proses administrasi ujian akhir. Terima kasih khusus disampaikan penulis kepada **Kak Ija, Kak Rahma, dan Bunda** untuk penyelamatan-penyelamatan nya ketika penulis memiliki permasalahan administratif.
7. Teman-teman penulis dari Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2013 **Seattle 2013**, terutama bagi teman-teman **AE 716** yang selalu menjadi teman diskusi dalam berbagai isu di saat-saat terakhir masa studi penulis. *Shout-out for Ayat, Iccang, Asrin, Budi, Sandi, Bob, Bang Thor, and Chandra, Dyva, Ardi, Enggra, Mekay, Oching, and so on. I may haven't mentioned everyone and I have so much to say, but some things are undscribable and mere words couldn't do it justice. You are all a part of an important memory of mine forever.*
8. **Unhas Model United Nations Community**, *the only campus-related organization I participated in and the most memorable organization I have ever participated in so far in my life. I won't mention everyone since it*

*wouldn't do it justice just to mention several of our members. Everyone deserves the shout-out as one big family.*

9. Senior-senior penulis, Kak **Taufik** yang sejak SMA telah menggembleng penulis dalam berpikir kritis dan logis, Almarhum Kak **Budi** dari Ilmu HI Angkatan 2009 yang jasanya tak bisa diutarakan dengan kata-kata lagi, Kak **Fitrah** dan kak **Adry** dari HI 2012 yang menjadi figur kakak dan mentor dalam berbagai hal.
10. Teman-teman penulis lainnya: saudari **Niar** yang selalu menjadi teman setia dalam segala bincang-bincang hingga kini; saudara **Panji**, saudari **Finka**, dan saudari **Novi** yang selalu menemani di bukan hanya waktu luang namun juga dalam hal-hal yang kadang di luar dugaan; saudara **Alam**, saudara **Restu**, saudara **Rijal**, saudara **Cakra** dan juga teman-teman lama penulis yang hingga hari ini masih menjalin silaturahmi.
11. Segala pihak dan individual yang memberikan masukan dan dorongan dalam bentuk apapun kepada penulis yang tidak sempat ditulis oleh penulis. Semua pelajaran yang diberikan akan dijadikan penulis untuk menjadi lebih baik kedepannya.

Makassar, 16 Desember 2019

Ari Putra Anugrah

## ABSTRAK

Ari Putra Anugrah, E131 13 511, Implementasi Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) di Indonesia dan Filipina, di bawah bimbingan Burhanuddin S.IP., M.Si selaku Pembimbing I dan Bama Andika Putra S.IP., MIR selaku pembimbing II, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk implementasi dari kerjasama multilateral Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF), yang bertujuan untuk bersama-sama menyusun langkah dalam menangani permasalahan yang meliputi konservasi terumbu karang, pengelolaan perikanan, dan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh dua negara anggotanya, yakni Indonesia dan Filipina. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif-analitik, dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Selanjutnya dalam menganalisis data, digunakan teknik analisis kualitatif dengan teknik penulisan deduktif.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kerjasama internasional CTI-CFF pada kedua negara tersebut didasari oleh sebuah sintesis antara berbagai rekomendasi kebijakan yang tertuang dalam Regional Plan of Action (RPoA) dengan berbagai peraturan dan kebijakan dalam negeri masing-masing negara. Dokumen tersebut menjadi blueprint perumusan peraturan dan kebijakan serta aktivitas terkait upaya-upaya konservasi ekosistem kelautan, kebijakan-kebijakan pengelolaan perikanan, dan penjaminan ketahanan pangan terkait perikanan di dalam masing-masing negara, dimana pengaruhnya terlihat dalam berbagai pembaharuan dan perumusan peraturan serta berbagai aktivitas yang dilaksanakan terkait dengan target-target yang telah dicanangkan dan disepakati bersama dalam CTI-CFF.

**Kata Kunci:** *Kerjasama Multilateral, Keamanan Lingkungan, Sumberdaya Kelautan, Terumbu Karang, Perikanan, Ketahanan Pangan, CTI-CFF, Indonesia, Filipina, Coral Triangle*

## ABSTRACT

Ari Putra Anugrah, E131 13 511, *The Implementation of Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) in Indonesia and Philippines, under the supervision of Burhanuddin S.IP., M.Si as First Supervisor and Bama Andika Putra S.IP., MIR as Second Supervisor, International Relations Department, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.*

*This study aims to discover and examine forms of implementation of the multilateral cooperation initiated by Indonesia in 2007 and agreed upon by five other nations located inside the Coral Triangle region in 2009 which was known as CTI-CFF to safeguard the coral reefs and marine ecosystem inside the region, to ensure sustainable fisheries practices and the achievement of food security in two of its members, Indonesia and Philippines. To achieve the said target, this study will be using descriptive-analytic type of research method, library research method of data collection, with qualitative analysis and deductive writing method.*

*The result of this study indicates that the implementation of CTI-CFF inside the two countries was being based from a synthesis between recommendations inside CTI-CFF's Regional Plan of Action (RPoA). The document serves as policy and regulation blueprint in both countries, being used in the making of regulations and policies in regard of fisheries management, food security, and marine ecosystem conservation. The influence of RPoA is apparent in many regulations, policies, and activities inside both countries, in which some are explicitly contain the very recommendations contained inside the RPoA document.*

**Keywords:** *Multilateral Cooperation, Environmental Security, Marine Resources, Coral Reefs, Fisheries, Food Security, CTI-CFF, Indonesia, Philippines, Coral Triangle.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
1. Kerjasama Multilateral.....	11
2. Keamanan Lingkungan.....	12
E. Metode Penelitian.....	14
1. Tipe Penelitian.....	14
2. Teknik Pengumpulan Data.....	14
3. Jenis Data .....	15
4. Teknik Analisis Data.....	15
5. Metode Penulisan.....	15

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Kerjasama Multilateral.....	16
B. <i>Environmental Security</i> .....	21
C. Penelitian-penelitian Sebelumnya dan Perbedaannya dengan Penelitian yang Dilaksanakan .....	31
<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>38</b>
A. Kondisi dan Permasalahan di Wilayah <i>Coral Triangle</i> .....	38
B. Kerjasama Multilateral <i>Coral Triangle Initiative on         Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF)</i> .....	49
1. <i>Regional Plan of Action</i> dan <i>National Plan of             Action</i> .....	52
C. Kondisi Kawasan <i>Coral Triangle</i> dan Perairan di Indonesia dan Filipina.....	58
1. Kondisi Kawasan <i>Coral Triangle</i> dan Perairan di Indonesia.....	59
2. Kondisi Kawasan <i>Coral Triangle</i> dan Perairan di Filipina.....	63
<b>BAB IV IMPLEMENTASI <i>CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES, AND FOOD SECURITY (CTI-CFF) DI INDONESIA DAN FILIPINA</i>.....</b>	<b>69</b>
A. Implementasi <i>Coral Triangle Initiative on         Coral Reefs, Fisheries, and Food Security         (CTI-CFF)</i> di Indonesia.....	74
1. Implementasi CTI-CFF di Indonesia dalam Konservasi Terumbu Karang.....	76
2. Implementasi CTI-CFF di Indonesia dalam Bidang Perikanan dan Ketahanan Pangan.....	83
B. Implementasi <i>Coral Triangle Initiative on         Coral Reefs, Fisheries, and Food Security         (CTI-CFF)</i> di Filipina.....	91
1. Implementasi CTI-CFF di Filipina dalam Konservasi Terumbu Karang.....	93
2. Implementasi CTI-CFF di Filipina dalam	

Bidang Perikanan dan Ketahanan Pangan.....	96
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>111</b>

## DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL

1.1.	Tingkat Konsumsi Ikan Dalam Kilogram Per Kapita Per Tahun Indonesia Tahun 2014-2016.....	5
2.1.	Matriks Perbedaan Fokus Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian Penulis.....	37
3.1.	Sebaran Terumbu Karang Dunia berdasarkan Kawasan.....	40
3.2.	Luas Terumbu Karang yang Terancam oleh Gabungan Ancaman Lokal dan Global di Negara-Negara <i>Coral Triangle</i> .....	48

## DAFTAR GAMBAR

3.1. Peta Kawasan <i>Coral Triangle</i> dan Wilayah Implementasi	
CTI-CFF.....	41

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ADB	- <i>Asian Development Bank</i>
APEC	- <i>Asia Pacific Economic Cooperation</i>
CBD	- <i>Convention on Biological Diversity</i>
CT6	- <i>Coral Triangle Six</i>
CTSP	- <i>Coral Triangle Support Program</i>
CTMPAS	- <i>Coral Triangle Marine Protected Area System</i>
EAFM	- <i>Ecosystem Approach on Fisheries Management</i>
EO	- <i>Executive Order</i>
FAO	- <i>Food and Agriculture Organization</i>
GDP	- <i>Gross Domestic Product</i>
GEF	- <i>Global Environment Facility</i>
IAS	- <i>Invasive Alien Species</i>
IUCN	- <i>International Union for Conservation of Nature</i>
IUU Fishing	- <i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i>
KKP	- <i>Kawasan Konservasi Perairan</i>
KKP-E	- <i>Kredit Ketahanan Pangan dan Energi</i>
KUB	- <i>Kelompok Usaha Bersama</i>
MM	- <i>Ministrial Meeting</i>
MPA	- <i>Marine Protected Area</i>
MSN	- <i>MPA Support Network</i>
MSY	- <i>Maximum Sustainable Yield</i>
NGO	- <i>Non-governmental Organization</i>
NIPAS	- <i>National Protected Areas</i>

NPoA	- <i>National Plan of Action</i>
Permen-KP	- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Pokdakan	- Kelompok Pembudidaya Ikan
RA	- <i>Republic Act</i>
RPoA	- <i>Regional Plan of Action</i>
SOM	- <i>Senior Official Meeting</i>
SSME	- <i>Sulu-Sulawesi Marine Ecosystem</i>
UNEP-MEA	- <i>The United Nations Environment Program's Millenium Ecosystem Assessment</i>
USAID	- <i>United States Agency for International Development</i>
WPP	- Wilayah Pengelolaan Perikanan
ZEE	- Zona Ekonomi Eksklusif

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada tahun 2009, Indonesia bersama Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, dan Kepulauan Solomon mendeklarasikan terbentuknya sebuah kerjasama multilateral yang bernama *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, And Food Security* (CTI-CFF). Kerjasama multilateral ini didasari dengan kesadaran bersama tentang perlunya melindungi sumberdaya laut dan pesisir pantai wilayah laut negara-negara yang terlibat dalam kerjasama multilateral ini, mengingat bahwa Segitiga Terumbu Karang atau *Coral Triangle* yang terletak di sebagian wilayah laut dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) keenam negara partisipan kerjasama multilateral ini merupakan *hotspot* sumberdaya bahari terbesar dunia terletak di wilayah anggota-anggotanya, dimana 76% spesies terumbu karang, 37% spesies ikan terumbu karang, serta 53% dari terumbu karang dunia terletak di wilayah yang luasnya hanya sekitar 1.6% dari luas wilayah laut dunia (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security, 2016, pp. 3-4).

Kekayaan sumberdaya yang melimpah di kawasan ini menjadi tempat bergantung bagi lebih dari 363 juta orang yang tinggal di dalam wilayah keenam negara tersebut, dan juga hal tersebut ditambah dengan:

- Sekitar  $\frac{1}{3}$  dari total warga negara-negara partisipan CTI-CFF yang menghuni daerah pesisir dalam wilayah Segitiga Terumbu Karang mengandalkan hasil

laut sebagai sumber pendapatan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan pangan;

- Estimasi potensi nilai tahunan dari wilayah terumbu karang, pepohonan mangrove, dan habitat alami yang terkait mencapai 2.3 milyar USD.
- Keberadaan terumbu karang dan mangrove yang terawat dengan baik dapat menjadi *barrier* alami bagi bencana alam, misalnya tsunami ataupun badai;
- Tempat berkembang biak tuna yang terdapat di wilayah Segitiga Terumbu Karang menjadi pondasi bagi industri tuna bernilai milyaran USD, turut serta dalam memberi suplai bagi kebutuhan tuna global, dan menyediakan ribuan kesempatan kerja bagi penduduk di wilayah tersebut baik dalam sektor penangkapan tuna dan sektor industri pengolahannya;
- Hasil tangkapan laut lainnya menyediakan suplai makanan yang penting bagi masyarakat lokal, terutama Indonesia yang memiliki tingkat konsumsi ikan yang tinggi, serta berpotensi menghasilkan ratusan juta USD setiap tahunnya;
- Wilayah terumbu karang yang produktif menghasilkan sebagian besar dari perdagangan hasil tangkap yang bernilai lebih dari 800 juta USD setiap tahunnya, yang utamanya menyuplai kebutuhan ikan di pasar China. Selain itu, sekitar lebih dari 100 juta USD dihasilkan tiap tahunnya dalam perdagangan ikan hias dan ornamen-ornamen khas laut lainnya yang turut menyuplai kebutuhan global;
- Sumberdaya bahari yang terawat juga menyokong tumbuhnya wisata bahari di berbagai lokasi terkait di kawasan tersebut, dan berpotensi menghasilkan puluhan juta USD setiap tahunnya, serta menyediakan kesempatan dan

lapangan kerja (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security, 2016, pp. 1-2).

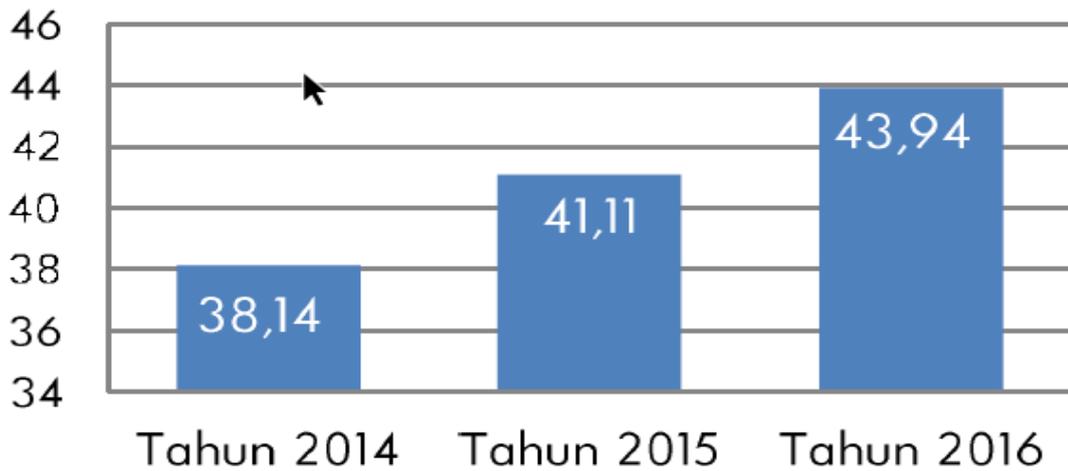
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, wilayah laut memerankan peran yang sangat penting bagi perekonomian, geopolitik, budaya, serta keberagaman alam Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terluas di dunia, dengan luas wilayah laut nyaris empat kali luas wilayah daratnya. Terletak di pusat jalur laut perdagangan dunia, wilayah laut Indonesia menjadi titik pertemuan bagi jalur pelayaran Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Wilayah garis pantai dan lautnya merupakan salah satu wilayah perairan terkaya di dunia, dimana hal ini berperan penting dalam posisi Indonesia sebagai negara penghasil ikan terbesar kedua di dunia setelah China. Kurang lebih sekitar 55% dari hasil ikan nasional Indonesia datang dari wilayah pesisir, seperti wilayah ladang rumput laut, wilayah mangrove, wilayah terumbu karang, dan wilayah hilir sungai atau estuaria (California Environmental Associates, 2015, p. 30).

Selain Indonesia, Filipina yang merupakan negara kepulauan terbesar kedua di dunia juga memandang wilayah lautnya sebagai wilayah yang sama pentingnya dengan Indonesia. Seluruh wilayah Filipina merupakan *apex* atau puncak dari wilayah Segitiga Terumbu Karang itu sendiri. Mengingat wilayah Segitiga Terumbu Karang adalah salah satu *hotspot* kekayaan sumberdaya bahari terbesar di dunia, maka tidak mengherankan bahwa Filipina dinobatkan sebagai salah satu dari 18 negara *megadiversity* di dunia yang mengandung sekitar 75% keberagaman biologi global. Wilayah pesisir dan laut Filipina yang kaya akan sumberdaya alam dimanfaatkan baik sebagai sumber vital untuk makanan, mineral dan bahan baku, ataupun sebagai wahana pariwisata dan kegiatan sosial dan kebudayaan terkait.

Aktivitas-aktivitas ekonomi di wilayah laut Filipina, seperti perikanan, pariwisata, transportasi laut, *coastal mining*, dan *off-shore oil and gas development* menjadi penyumbang yang sangat signifikan bagi *GDP* Filipina serta menjadi sumber-sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir (Republic of the Philippines, 2009, p. 4).

Dari tahun ke tahun, sektor perikanan nasional Indonesia selalu mengalami kenaikan dalam hasil produksi. Pada tahun 2015, hasil produksi sektor perikanan nasional mencapai 5.9 juta metrik ton untuk hasil tangkap dan 4.4 juta metrik ton untuk hasil tambak. Sektor perikanan nasional juga menjadi salah satu penyedia lapangan kerja yang penting bagi Indonesia, dengan kurang lebih sekitar 6 juta orang menggantungkan hidupnya di sektor perikanan baik itu dari sektor pertambakan dan penangkapan *wild catch*. Selain itu, kurang lebih tambahan 1 juta orang yang bekerja dalam sektor produksi dan penjualan hasil olahan perikanan. Sektor perikanan juga menjadi hal yang vital bagi masyarakat pesisir yang menjadikan profesi nelayan sebagai mata pencaharian utama dalam kehidupan sehari-hari mereka (California Environmental Associates, 2018, p. 4).

Konsumsi ikan nasional pun mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa daya serap atau permintaan produk perikanan semakin tinggi, serta adanya perubahan dalam pola konsumsi masyarakat dalam menjadikan ikan sebagai sumber protein hewani (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2017, p. 46)



**Diagram 1.1: Tingkat Konsumsi Ikan Dalam Kilogram Per Kapita Per Tahun Indonesia Tahun 2014-2016**

**Sumber: Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2016**

Dengan pertimbangan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumberdaya bahari yang melimpah, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan konsumsi protein hewani dari ikan, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menyeimbangkan produksi ikan dan pelestarian lingkungan kelautan itu sendiri. Dalam *State of the Coral Triangle Report Highlights Indonesia* yang dirilis CTI-CFF (2012), eksploitasi sumberdaya kelautan yang berlebihan terjadi secara meluas di seluruh wilayah perairan Indonesia dan dilakukan oleh baik nelayan lokal ataupun *fishing fleet* asing. Eksploitasi berlebihan tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan stok ikan nasional, namun juga menggerus keberagaman spesies laut Indonesia. Hal ini telah terbukti dari mulai langkanya beberapa spesies di perairan Indonesia, seperti spesies kerang raksasa dan penyu. Selain itu, *overfishing* dan kerusakan habitat alami seperti kawasan *mangrove* dan terumbu karang dalam beberapa dekade terakhir juga turut memberi pengaruh buruk pada keadaan wilayah laut Indonesia,

mengancam keberlangsungan hidup beragam spesies makhluk hidup di laut, dan juga berdampak negatif terhadap berbagai subsektor ekonomi yang terkait dengan wilayah laut dan pesisir. Bila tidak segera ditangani secara seksama, maka laut Indonesia akan sangat rentan terhadap kerusakan yang sangat sukar dipulihkan.

Republik Filipina pun memiliki hubungan yang sangat penting dengan wilayah laut dan pesisirnya. Dalam *State of the Coral Triangle Report Highlights Philippines* oleh CTI-CFF (2009) disebutkan bahwa ikan masih menjadi sumber protein utama bagi masyarakat Filipina, yakni sekitar 70% dari total konsumsi protein hewani dan 30% dari total konsumsi protein keseluruhan. Selain itu, sekitar satu juta warga Filipina bekerja di sektor perikanan, baik sebagai nelayan, *middleman*, dan dalam sub-sektor produksi produk-produk olahan ikan. Akan tetapi kerusakan lingkungan yang terjadi di Filipina mengancam kemampuan Filipina untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik untuk sumberdaya perikanan, namun juga keberlangsungan sektor perikanan dan kelautan untuk jangka panjang. Hal ini mulai terlihat dari berkurang drastisnya wilayah *mangrove* Filipina yang awalnya dari 400.000 ha menjadi 247.268 ha dan mulai tergerusnya 30% sampai 50% wilayah *seagrass bed* atau padang rumput laut Filipina dalam 50 tahun terakhir dikarenakan perkembangan industri, pengembangan aktivitas pariwisata, dan pembangunan pelabuhan. Wilayah terumbu karang Filipina pun tak lepas dari kerusakan, dengan 40% total wilayah terumbu karang di Filipina dalam keadaan buruk, dan wilayah terumbu karang dalam keadaan sangat baik berkurang secara perlahan hingga di bawah 5% dari total luas wilayah terumbu karang dalam rentang tahun 2000-2004. Walaupun telah terjadi peningkatan yang cukup baik dalam pengelolaan terumbu karang di Filipina, terumbu karang di Filipina masih terancam

oleh kegiatan *overfishing*, metode penangkapan ikan yang destruktif, pengembangan pesisir yang tidak memerhatikan aspek *sustainability*, serta sedimentasi dan polusi.

Melalui kesadaran bersama akan pentingnya menjaga dan mengelola laut dengan lebih seksama, negara-negara yang masuk dalam wilayah *Coral Triangle* yang lazim dikelompokkan dalam *Coral Triangle 6 (CT6)* yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini, menyusun kerjasama multilateral CTI-CFF untuk menghadapi tantangan-tantangan serta masalah-masalah terkait terumbu karang dan wilayah laut, perikanan, dan ketahanan pangan. Salah satu upaya untuk memperbaiki tata kelola laut bersama di negara-negara tersebut yakni melalui implementasi dari *Regional Plan of Action* hasil rumusan CTI-CFF, mengaitkan lima poin tersebut dalam berbagai kebijakan dalam negara CT6. *Regional Plan of Action* yang disediakan itu sendiri dapat diterapkan di wilayah laut negara secara keseluruhan dan tidak terbatas hanya pada kawasan Segitiga Terumbu Karang di negara terkait, berdasarkan hukum-hukum internasional yang berlaku dan hukum-hukum negara terkait.

CTI-CFF melahirkan *Regional Plan of Action* yang menjadi acuan bagi negara-negara partisipan dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang tepat dalam memanfaatkan serta merawat wilayah laut. *Regional Plan of Action* dari CTI-CFF ini didasari dari lima tujuan yang dirumuskan pada *Senior Official Meeting* pada tahun 2007, yakni:

- Pengelolaan wilayah bentang laut prioritas;
- Pendekatan berdasar ekosistem dalam pengelolaan perikanan;

- Kawasan konservasi perairan;
- Adaptasi perubahan iklim;
- Penanganan spesies terancam punah;

Dari lima poin yang dirumuskan dalam *Regional Plan of Action* tersebut, isu lingkungan menjadi fokus utama yang diperhatikan oleh CTI-CFF. Terutama bagi negara berbentuk kepulauan atau *archipelagic state* seperti Indonesia dan Filipina, urgensi kedua negara tersebut untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan kelautan tersebut menjadi sangat besar dan krusial dikarenakan luasnya wilayah laut di dalam masing-masing negara dan pentingnya wilayah laut dalam kehidupan sehari-hari warga negaranya. Perubahan iklim global dan peningkatan suhu bumi pun menjadi ancaman tambahan yang harus dihadapi kedua negara dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam wilayah laut mereka. Kedua fenomena alam tersebut turut menjadi bagian dari faktor-faktor yang mengancam keadaan wilayah laut di wilayah *Coral Triangle*, dimana peningkatan suhu bumi turut mempengaruhi suhu laut di wilayah ini dan mengakibatkan fenomena *coral bleaching* atau pemutihan karang, yang merupakan sebuah fenomena kerusakan pada spesies karang. Hal ini tentu menambah urgensi bagi Indonesia dan Filipina, untuk bertindak secara serius dalam mengatasi permasalahan di wilayah lautnya, dimana *Regional Plan of Action* tersebut merupakan *blueprint* dari *National Plan of Action* masing-masing negara yang memuat target fokus dan urutan langkah yang lebih mendetail untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam jangka waktu yang ditargetkan oleh kedua negara tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut, kita dapat menarik garis besar yang cukup menarik dari apa saja tantangan di bidang kelautan yang dihadapi oleh negara

*archipelagic* di kawasan Asia Tenggara, yakni Indonesia dan Filipina. Isu lingkungan seperti *global warming* dan permasalahan wilayah kelautan seperti *overfishing* ataupun *destructive fishing* turut menjadi sorotan bagi kedua negara dalam mengelola dan menjamin keberlangsungan wilayah lautnya. Hadirnya *CTI-CFF* diharapkan menjadi salah satu titik penting bagi kedua negara dalam menemukan solusi yang tepat untuk menangani bidang kelautan dan perikanan di masing-masing negara. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **Implementasi *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF)* di Indonesia dan Filipina.**

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Untuk menyederhanakan pembahasan ini, penulis akan berfokus dalam memaparkan dan menganalisa hasil kerjasama multilateral dalam *CTI-CFF* dalam rentang tahun 2009 hingga 2017 yang telah disepakati dalam dokumen *Regional Plan of Action* serta memaparkan bagaimana Indonesia dan Filipina mempertemukan hasil kesepakatan tersebut dengan kebijakan, undang-undang, dan upaya-upaya yang telah ada sebelumnya untuk menghasilkan peraturan, kebijakan, ataupun aktivitas lainnya yang terkait dengan tiga tema sentral *CTI-CFF*, yakni terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai batasan tersebut, berikut formulasi rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

- Bagaimana bentuk implementasi dari hasil kerjasama dalam *CTI-CFF* yang diterapkan oleh Indonesia?

- Bagaimana bentuk implementasi dari hasil kerjasama dalam CTI-CFF yang diterapkan oleh Filipina?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- Untuk mengetahui seperti apa pengaruh yang diberikan oleh CTI-CFF dalam perumusan kebijakan terkait di Indonesia dan Filipina.
- Untuk mengetahui *point of view* Indonesia dan Filipina dalam menginterpretasikan hasil yang telah disepakati dari CTI-CFF dalam kebijakan yang diambil oleh kedua negara tersebut.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademisi Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Dosen dan Mahasiswa dalam mengkaji dan memahami kerjasama multilateral dan keamanan lingkungan.
- Untuk dijadikan referensi tambahan bagi tiap-tiap aktor Hubungan Internasional atau diluar Hubungan Internasional, mulai dari individu, organisasi internasional atau non-internasional, hingga pemerintah yang menaruh minat untuk mengkaji kerjasama multilateral dan keamanan lingkungan.

## **D. Kerangka Konseptual**

### **1. Kerjasama Multilateral**

*Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security* (CTI-CFF) merupakan sebuah bentuk kerjasama internasional antara Indonesia,

Malaysia, Filipina, Timor Leste, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini yang diprakarsai oleh tujuan bersama dalam menjaga sumberdaya alam perairan di kawasan Segitiga Terumbu Karang yang merupakan *hotspot* kekayaan bahari dunia. Kesamaan tujuan tersebut merupakan salah satu faktor yang mendasari kerjasama tersebut diprakarsai, dan kerjasama sendiri merupakan sebuah hal yang lumrah dilakukan antara dua negara atau lebih di dunia.

Dalam hal ini, kerjasama dapat diartikan sebagai sebuah situasi dimana pihak-pihak partisipan menyetujui untuk bekerja bersama dengan tujuan mencapai hasil-hasil tertentu untuk setiap pihak terkait, dimana hasil-hasil tersebut tak dapat dicapai sendiri oleh pihak terkait. Hasil disini bukan hanya sekedar dalam artian hal hasil material saja, namun juga mencakup pencapaian tujuan tertentu, seperti peningkatan keamanan, kebebasan dalam melakukan sesuatu, penetapan batas-batas tertentu pada aktor tertentu (Cambridge University Press, 2010, p. 1). Maka oleh karena itu, kerjasama multilateral dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang diambil oleh lebih dari dua negara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, baik dalam bentuk tujuan bersama yang disepakati bersama oleh semua pihak dalam kerjasama tersebut, ataupun tujuan tertentu yang ingin dicapai suatu negara dalam partisipasinya dalam kerjasama tersebut, dimana tujuan yang ingin diraih oleh negara tersebut sukar untuk dicapainya sendiri.

Dalam CTI-CFF, keenam negara anggota serta berbagai pihak lainnya bekerjasama untuk tidak hanya meneliti keadaan lingkungan kelautan dan perikanan dan menyusun *blueprint* kebijakan yang terbatas dalam kawasan Segitiga Terumbu Karang tiap negara partisipan saja, namun juga *blueprint* kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam taraf nasional di seluruh wilayah perairan negara

partisipan terkait. Menarik untuk melihat bagaimana pola interaksi yang terjadi antara Indonesia dengan CTI-CFF sendiri dan menelaah lebih dalam mengenai tujuan-tujuan Indonesia yang diharapkan untuk dicapai dalam kerjasama internasional tersebut.

## **2. Keamanan Lingkungan**

Kejadian-kejadian penting dalam dunia politik global pada tahun 1970-an dan 1980-an menjadi momentum penting dalam turut diperhitungkannya isu lingkungan sebagai bagian dari isu keamanan suatu negara. Salah satu ketakutan yang muncul kala itu yakni dengan munculnya kekhawatiran mengenai ketersediaan sumberdaya alam yang mulai menipis, salah satunya dikarenakan terjadinya krisis minyak pada tahun 1970-an, dan persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet kala itu turut berpartisipasi dalam momentum diperhatikannya isu lingkungan (Hough, *International Security Studies Theory And Practice*, 2015, p. 211). Dalam perkembangannya, isu keamanan suatu negara sudah tidak lagi didominasi oleh ancaman tradisional semata, misalnya ancaman militer negara lain. Isu lingkungan seperti misalnya pemanasan global, perubahan iklim, *overfishing*, pemakaian sumberdaya secara kurang bijak, dan kelangkaan sumberdaya alam pun dapat mengancam negara dikarenakan berpotensi memicu konflik (E-International Relations Publishing , 2016, p. 49).

Laut merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat di banyak negara di berbagai belahan dunia. Terutama bagi negara-negara yang memiliki wilayah laut yang luas, wilayah perairan menjadi salah satu penghasil berbagai sumberdaya yang penting bagi masyarakat. Bisnis perikanan dan kelautan, seperti usaha penangkapan ikan, pertambakan, dan pariwisata menjadi sumber-

sumber pendapatan dan pemenuhan pangan yang penting bagi masyarakat. Ancaman terhadap wilayah laut, seperti *overfishing* ataupun *destructive fishing*, dapat mengancam keadaan ekosistem laut dalam jangka panjang dan bila dibiarkan tanpa tindakan-tindakan yang tepat dapat mengakibatkan efek buruk yang meluas di berbagai bidang yang menggantungkan keberlangsungan kegiatannya pada wilayah laut.

Di kawasan Segitiga Terumbu Karang, CTI-CFF diprakarsai dengan tujuan untuk bersama-sama mencari solusi dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang perikanan, kelautan, serta ketahanan pangan. *Overfishing*, *destructive fishing*, dan perubahan iklim merupakan beberapa hal yang menjadi tantangan bersama untuk menjamin kondisi ekosistem laut di kawasan tersebut. Dalam hal ini, Indonesia dan Filipina sebagai negara *archipelagic* dengan wilayah laut yang luas tentu menaruh perhatian terhadap tata kelola yang lebih baik atas wilayah lautnya, sehingga dibutuhkan perhatian yang serius oleh kedua negara tersebut dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan kelautannya demi menjaga keberlangsungan wilayah lautnya masing-masing untuk jangka panjang.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dengan metode penelitian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana hasil kesepakatan bersama dalam CTI-CFF, yakni *Regional Plan of Action*, diinterpretasikan lebih jauh ke dalam *National Plan of Action* masing-masing Negara dan kemudian diimplementasikan dalam berbagai kebijakan, peraturan,

serta aktivitas terkait baik di Indonesia maupun Filipina berdasarkan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh kedua negara tersebut.

Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Lebih spesifik, cakupan bagian dari tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai argumen yang relevan. Kemudian, hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode *Library Research* untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data-data dapat diperoleh melalui buku, jurnal, dokumen, artikel, laporan, serta berbagai media lainnya seperti internet, majalah maupun surat kabar harian baik itu cetak maupun daring.

## **3. Jenis Data**

Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur seperti buku, jurnal, artikel, majalah, *handbook*, situs internet, dan laporan institusi dan lembaga terkait. Adapun data yang dibutuhkan ialah data yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis tentang CTI-CFF serta bentuk-bentuk implementasinya secara langsung, yakni dalam bentuk peraturan ataupun aktivitas di dalam bidang kelautan dan perikanan di Indonesia dan Filipina, terutama selama rentang waktu 2009 hingga 2017, yang

memiliki korelasi dengan *Regional Plan of Action* CTI-CFF dan *National Plan of Action* kedua negara tersebut.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Pertama, data direduksi dengan menggolongkan mana yang perlu diambil dan dibuang, kemudian disajikan dengan naratif terhadap hasil penelitian/pengumpulan informasi, setelah itu menarik kesimpulan terhadap hasil analisis data.

#### **5. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis ialah metode deduktif, yaitu dengan menggambarkan secara umum masalah yang diteliti dan kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerjasama Multilateral**

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi yang dilakukan oleh aktor-aktor hubungan internasional. Kerjasama ditempuh oleh aktor-aktor terkait sebagai salah satu usaha untuk mencapai kepentingan yang tidak bisa dicapainya sendiri dan sebagai bentuk antisipasi aktor hubungan internasional tersebut dalam menghadapi pilihan tindakan aktor lainnya. Oleh karena itu, kerjasama yang ditempuh oleh aktor-aktor hubungan internasional tersebut berujung pada sejauh mana keuntungan yang didapatkan oleh aktor-aktor terkait berdasarkan kepentingan yang ingin dicapai.

Kerjasama antar aktor-aktor tersebut dapat tercipta dari berbagai dinamika yang ada dalam berbagai bidang di kehidupan internasional, seperti ideologi, pertahanan, ekonomi, sosial, politik, lingkungan hidup, dan keamanan. Berbagai permasalahan yang ada di dalam berbagai bidang tersebut mendorong aktor-aktor hubungan internasional untuk bekerjasama mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan tak dapat diselesaikan oleh aktor secara individu. Kerjasama internasional menjadi wadah dan sarana untuk aktor-aktor hubungan internasional untuk bersama-sama memikirkan dan mencari solusi yang tepat bagi permasalahan yang sedang dihadapi tanpa memandang batas dan jarak fisik antara aktor-aktor yang terlibat.

Selain pengertian tentang kerjasama sebelumnya, kerjasama juga dapat diartikan sebagai sebuah hubungan dimana bukan hanya adanya keinginan dari

aktor-aktor hubungan internasional terkait yang ingin melakukan interaksi, namun juga mengesankan bahwa terdapat keinginan untuk merawat dan menjaga interaksi tersebut. Selain itu, interaksi tersebut menyiratkan rasa empati dasar di antara mereka, dimana kondisi suatu aktor menjadi perhatian bagi aktor lain dikarenakan sebuah kesadaran bahwa kondisi yang baik bagi aktor tersebut juga akan berimbas baik pada kondisi aktor yang lain (Cambridge University Press, 2010, p. 2).

K.J. Holsti (dikutip dalam Ridona, 2015) mengenai beberapa definisi dari kerjasama internasional, yaitu:

- Kerjasama internasional merupakan gabungan atau saling bertemunya dua atau lebih pandangan, kepentingan, nilai dan tujuan yang kemudian dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dapat dipenuhi oleh semua pihak sekaligus;
- Kerjasama internasional merupakan hasil dari pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negaranya demi mencapai kepentingan dan nilai-nilainya;
- Kerjasama internasional merupakan persetujuan antara dua negara atau lebih dalam rangka menghadapi masalah-masalah tertentu, dengan memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan;
- Kerjasama internasional merupakan aturan resmi atau tidak resmi;
- Kerjasama internasional merupakan pemenuhan persetujuan antar dua negara atau lebih.

Berakhirnya Perang Dingin yang diiringi oleh mulai terintegrasinya perekonomian dunia secara menyeluruh dikarenakan mulai mudahnya perpindahan

kapital, manusia, dan informasi, mulai memunculkan ketertarikan baru terhadap kerjasama multilateral sebagai sebuah bentuk organisasi dalam hubungan internasional dan ekonomi politik global. Dalam bidang ekonomi dan lingkungan misalnya, berdirinya WTO dan jaringan organisasi-organisasi pemerhati lingkungan transnasional menunjukkan bahwa pergerakan menuju liberalisasi pasar dan integrasi global akan diwarnai oleh berbagai bentuk regulasi, manajemen, dan lobi-lobi yang bersifat multilateral (Griffiths & O'Callaghan, 2004, p. 198).

Di abad ke-21 ini, semakin banyak tantangan yang muncul dan sulit untuk diselesaikan oleh suatu aktor saja tanpa bekerjasama dengan aktor lainnya, baik itu oleh entitas negara ataupun entitas non-negara. Kerjasama yang dilakukan oleh entitas negara ataupun entitas non-negara tentu tidak terlepas dari kepentingan yang ingin diraih dalam melakukan kerjasama tersebut. Kerjasama multilateral menjadi salah satu cara yang ditempuh oleh lebih dari dua aktor negara dan non-negara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama, seperti misalnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kawasan mereka berada ataupun kerjasama ekonomi di bidang tertentu. Kerjasama multilateral merupakan sebuah konsep penting dalam hubungan internasional untuk melihat pola interaksi beberapa negara ataupun non-negara sebagai salah satu metode untuk memenuhi kepentingannya atau untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati penting untuk dicapai bersama. Dougherty dan Pfaltzgraff Jr. (2000, p. 507) mengutip definisi multilateralisme yang diajukan oleh John Gerard Ruggie, yakni merupakan sebuah bentuk institusi yang mengkoordinasi hubungan-hubungan antara tiga negara atau lebih berdasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku secara umum dalam. Sehingga dapat disimpulkan secara sederhana bahwa kerjasama multilateral adalah

sebuah bentuk kerjasama antara tiga negara atau lebih yang berdasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang umumnya berlaku dalam berbagai bentuk institusi seperti organisasi internasional, rezim internasional, ataupun dalam keteraturan internasional yang bersifat kurang konkrit, seperti misalnya perdagangan terbuka di akhir abad ke-19 atau awal perekonomian global di permulaan abad ke-20. Kerjasama yang dilakukan dapat tercipta di dalam sebuah bentuk institusi yang bersifat lebih atau kurang formal, dengan jumlah peraturan yang banyak ataupun sedikit, berdasarkan norma-norma yang disepakati bersama, ataupun dalam bentuk prosedur-prosedur *decision-making* yang lebih sederhana.

Multilateralisme sendiri merupakan sebuah kecenderungan strategis untuk bertumpu pada tindakan-tindakan dari beberapa partisipan dibandingkan tindakan sebuah negara saja. Pengambilan keputusan dilakukan secara bersama oleh semua negara dan aktor non-negara yang merupakan partisipan dalam kerjasama multilateral, sehingga hasilnya lebih dapat diterima oleh masyarakat internasional secara umum walaupun tidak semengikat dalam bentuk kerjasama dengan jumlah partisipan yang lebih rendah, seperti misalnya kerjasama bilateral yang hanya melibatkan dua negara saja dalam kerjasamanya (Cambridge University Press, 2010, p. 40).

Selain itu, multilateralisme memiliki tiga prinsip utama dalam pelaksanaannya, yakni:

- *Non-discrimination*, dimana negara-negara yang terlibat dalam kerjasama multilateral harus menjalankan kewajiban yang telah disepakati tanpa

pengecualian yang berdasarkan aliansi, situasi yang sedang dihadapi, atau seberapa besar kepentingan negara yang dipertaruhkan;

- *Indivisibility*, dimana dalam konteks kerjasama militer yang bersifat multilateral, serangan terhadap salah satu anggota kerjasama multilateral terkait merupakan serangan terhadap seluruh anggota yang lain. Secara umum, negara-negara partisipan saling terikat satu sama lain dalam pencapaian target yang telah disepakati bersama;
- *Diffuse reciprocity*, dimana negara-negara partisipan mengutamakan interaksi timbal-balik dalam menjalankan kerjasama multilateral tersebut, dan berfokus pada merumuskan tujuan-tujuan yang hasilnya dapat dirasakan bersama oleh seluruh anggota kerjasama multilateral terkait (Griffiths & O'Callaghan, 2004, pp. 197-198).

Selain berbagai keuntungan yang dimiliki oleh kerjasama multilateral, tentunya terdapat kekurangan dari kerjasama multilateral itu sendiri. Kerjasama multilateral seringkali dianggap sebagai pedang bermata dua baik bagi negara-negara besar maupun negara-negara kecil. Bagi negara-negara kecil, kerjasama multilateral menyajikan kesempatan bagi mereka untuk melaksanakan kebijakan luar negerinya. Di sisi lain, negara-negara kecil menjadi terbebani oleh kewajiban-kewajiban yang lahir dari kerjasama multilateral yang bisa saja memberatkan bagi negara-negara kecil tersebut, misalnya dalam mengirimkan tentara *peace-keeping* di daerah rawan konflik. Sedangkan bagi negara-negara besar, kerjasama multilateral menyajikan kesempatan untuk mempermudah tercapainya kesepakatan terhadap kebijakan atau kepentingan mereka. Di sisi lain, kerjasama multilateral menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara besar dalam hal meyakinkan setiap

anggota kerjasama multilateral dalam menyetujui kebijakan-kebijakan tertentu (Cambridge University Press, 2010, pp. 40-41). Selain itu, jumlah kerjasama multilateral di dunia yang berkisar lebih dari 250 kerjasama yang diikuti oleh tujuan yang terlalu banyak, dinilai oleh *The North Institute* (dikutip dalam Pappang, 2017) sebagai tidak terlalu efektif dan dampaknya tidak terlalu banyak menurut orang-orang di masa kini. Oleh karena itu, pembuat kebijakan dituntut untuk bersikap jujur dalam menimbang keuntungan yang diperoleh dari kerjasama multilateral tersebut, dikarenakan untuk menjawab tantangan global yang dihadapi saat ini sudah tidak diperlukan lagi tujuan-tujuan yang bersifat usang dan tidak efektif.

### **B. *Environmental Security* (Keamanan Lingkungan)**

Aman dapat diartikan sebagai terbebas dari ancaman ataupun gangguan. Namun tidak ada yang benar-benar aman sepenuhnya. Dalam konteks kehidupan bernegara sehari-hari terdapat banyak hal yang dapat mengancam rasa aman kita, seperti misalnya kecelakaan, kelangkaan sumberdaya alam, kehilangan pekerjaan, dan bahkan terjadinya perang. Yang tidak terbantahkan adalah kenyataan bahwa rasa aman merupakan salah satu persyaratan utama bagi manusia untuk dapat hidup dengan baik.

Keamanan adalah salah satu bidang studi penting dalam hubungan internasional. Pada saat Perang Dingin, studi keamanan berfokus pada pandangan realis dimana aktor terpenting dalam hubungan internasional adalah negara, yang memiliki fokus untuk melindungi kedaulatannya. Dikarenakan, menurut para pemikir realis, negara-negara khawatir akan perang sehingga keamanan menjadi perhatian utama dari negara-negara kala itu. Untuk mencapai keamanan dari

ancaman tersebut tentu tidak mudah, mengingat dunia internasional yang bersifat anarkis yang menjadikan sebuah negara tidak bisa semerta-merta berharap bahwa negara lain akan melindungi negaranya sepenuhnya. Mereka harus tetap berusaha untuk melindungi dirinya sendiri dengan memperkuat pertahanannya sendiri (Griffiths & O'Callaghan, 2004, p. 290).

Namun setelah Perang Dingin berakhir, terjadi sebuah perubahan besar dalam studi keamanan, dimana baik akademisi maupun para pembuat keputusan di pemerintahan mulai perlahan meninggalkan pendekatan yang awalnya *state-centrist* yang memandang negara sebagai pusat dari studi keamanan, dan mulai beralih ke pandangan yang lebih ekspansif dalam mendalami konsep keamanan itu sendiri. Sebuah pandangan radikal mengenai hal tersebut bahkan menyatakan bahwa keamanan sudah harus mencakup keseluruhan umat manusia, tidak lagi terikat pada negara saja, dan juga harus mulai memerhatikan sumber-sumber ancaman keamanan lain selain ancaman militer saja. Perluasan perspektif ini terjadi karena dua hal. Pertama, walaupun perang antarnegara adalah hal yang sangat mungkin terjadi, banyak dari konflik-konflik terparah di dunia adalah yang terjadi di dalam negara. Dibandingkan kepentingan nasional, yang selalu terancam oleh terjadinya konflik-konflik tersebut seringkali adalah kebudayaan ataupun identitas kelompok. Perspektif ini berpendapat bahwa pandangan realis mengenai keamanan diformulasi terlalu sempit. Kedua, kapasitas sebuah negara untuk menjamin keamanan warga negaranya telah terkikis oleh berbagai ancaman non-militer, seperti permasalahan lingkungan, pertumbuhan populasi yang tidak terkontrol, wabah penyakit, krisis pengungsi, dan kelangkaan sumberdaya alam. (Griffiths & O'Callaghan, 2004, pp. 290-291).

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia memiliki sejarah yang kompleks. Akan tetapi, hingga periode ekspansi global orang-orang Eropa dan Revolusi Industri, kerusakan lingkungan tersebut rata-rata terjadi secara tidak merata dan secara relatif terlokalisasi di daerah-daerah tertentu saja. Krisis lingkungan modern— yang ditandai dengan naik drastisnya permasalahan lingkungan dalam segi jarak, skala, dan keseriusan efeknya di dunia—secara umum dipahami mengemuka di paruh terakhir Abad Ke-20. Tahun 1960-an seringkali ditandai sebagai periode lahirnya gerakan peduli lingkungan modern sebagai gerakan sosial yang tersebar luas dan gigih dalam mempublikasikan dan mengkritisi ‘efek samping’ *economic boom* yang terjadi cukup lama pasca-Perang Dunia Kedua terhadap lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, penyebaran teknologi-teknologi baru, dan pertumbuhan populasi di periode tersebut menyebabkan meningkatnya konsumsi energi dan sumberdaya, munculnya sumber-sumber baru (dan peningkatan tingkat) produksi polusi dan limbah, dan tergerusnya biodiversitas Bumi secara cepat (Dunne, Kurki, & Smith, 2013, p. 268).

Walaupun berbagai negara telah berhasil meningkatkan kondisi lingkungannya di akhir Abad Ke-20, penilaian lingkungan global untuk Abad Ke-21 masih terkesan suram. Dunne, Kurki, dan Smith (2013, p. 268) mengutip *The United Nations Environment Program Millenium Ecosystem Assessment* (UNEP MEA) yang diselesaikan pada Maret 2005, melaporkan bahwa sekitar 60% dari layanan ekosistem yang diperiksa dan dapat menyokong kehidupan di Bumi digunakan secara tidak berkelanjutan dan mengalami degradasi kondisi.

‘*Ecological crisis*’ tentunya merupakan sebuah kategorisasi yang tepat terhadap berbagai perkembangan dalam hal ini, walaupun ‘*ecological predicaments*’ lebih

memadai untuk menggambarkan teka-teki unik yang dihadapi oleh para pembuat keputusan di semua tingkat pemerintahan, yakni dimana permasalahan lingkungan tetap gigih dan terjadi dimana-mana walaupun tidak ada yang bermaksud membuatnya terjadi, seperti yang diutarakan oleh Dunne, Kurki, & Smith (2013, p. 268) dalam buku *International Relations Theories*. Lebih lanjut dijelaskan, tidak seperti ancaman militer yang bersifat disengaja, berlainan, spesifik, dan membutuhkan respon sesegera mungkin, permasalahan lingkungan secara tipikal bersifat tidak disengaja, tersebar, lintas-batas, terjadi dalam jangka panjang, melibatkan berbagai macam aktor, dan membutuhkan perjanjian dan kerjasama yang telaten antara berbagai *stakeholder* dalam penanganannya. Permasalahan lingkungan memang sering dijuluki sebagai ‘masalah-masalah kejam’ oleh analisis kebijakan dikarenakan oleh kerumitan, keberagaman, tak dapat direduksi, kedegilan, dan sifatnya yang insidental. Kebanyakan resiko-resiko kerusakan lingkungan muncul ke permukaan di dunia yang mengalami modernisasi secara cepat sebagai efek samping yang tak terduga dari berbagai pelaksanaan yang pantas sebelumnya.

Tidak memakan waktu lama hingga suara-suara radikal dalam berbagai gerakan peduli lingkungan, serta suara-suara kritis dari ilmu sosial dan sastra, untuk mempertanyakan bukan hanya efek samping dari pertumbuhan ekonomi, namun juga mempertanyakan pertumbuhan ekonomi itu sendiri dan proses-proses modernisasi secara umum. Perdebatan ini semakin terpolitisasi dengan munculnya perdebatan *limit to growth* di awal 1970-an. Beberapa penerbit-penerbit berpengaruh menyajikan berbagai prediksi gawat mengenai bencana lingkungan yang akan terjadi kecuali pertumbuhan ekonomi secara eksponensial digantikan

dengan perkembangan ekonomi yang bersifat *steady-state*, dimana negara berfokus pada mencapai ekuilibrium antara pertumbuhan produksi dan pertumbuhan populasi. Mengemukanya perdebatan ini juga bertepatan dengan diadakannya *United Nations Stockholm Conference on the Human Environment* yang pertama pada tahun 1972 dimana isu lingkungan secara resmi diperhatikan secara global (Dunne, Kurki, & Smith, 2013, p. 268).

Walaupun optimisme pasca-Perang Dingin di awal dekade 1990-an yang mendorong terjadinya ‘sekuritisasi’ terhadap permasalahan lingkungan, pendekatan yang sama sejatinya telah digunakan sejak dekade 1970-an dengan basis terancamnya stok sumberdaya alam. Richard Falk (dikutip dalam Hough, 2015) menyatakan bahwa:

“kita perlu untuk mengubah pandangan kita seluruhnya mengenai konsep keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi bila kita ingin menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan.”

Selain itu, Sprout dan Sprout (dikutip dalam Hough, 2015) pun menyuarakan hal yang senada, yakni perlunya *International Relations* untuk mulai fokus terhadap keamanan global dibandingkan keamanan nasional dikarenakan skala ancaman yang begitu besar dari kelangkaan sumberdaya dan overpopulasi. Bahkan pada tahun 1948, Osborn (dikutip dalam Hough, 2015) pun telah menyuarakan hal yang memiliki esensi yang sama terhadap kedua pendapat tersebut, dimana beliau beropini bahwa kelangkaan sumberdaya alam dapat menjadi penyebab terjadinya perang sebelum gagasan ini mulai dipopulerkan, dimana salah satu dari berbagai penyebab utama dari tindakan-tindakan agresif yang dilakukan oleh negara-negara individual dan juga banyak dari perselisihan yang sedang terjadi di antara beberapa kelompok-kelompok negara saat ini dapat dikerucutkan ke berkurangnya wilayah produktif dan naiknya tekanan populasi. Ditulis ketika Perang Dingin belum terjadi

sepenuhnya, hal ini menunjukkan bahwa bagaimana permasalahan lingkungan telah masuk dalam agenda keamanan di paruh kedua Abad Ke-20.

Di akhir Perang Dingin, pemikiran-pemikiran tersebut sudah mulai memasuki *political mainstream* dan bahkan sampai ke telinga negara adidaya. Sebuah artikel berpengaruh yang ditulis oleh seorang diplomat Amerika Serikat Jessica Matthews pada tahun 1989 untuk *Foreign Affairs*, yang merupakan sebuah jurnal yang konservatif dan berpengaruh, menyatakan perlunya negara-negara untuk memberikan perhatian yang memadai terhadap ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh permasalahan lingkungan. Matthews, yang merupakan mantan anggota *National Security Council* milik pemerintahan Amerika Serikat, mengikuti alur pemikiran dari Osborn, Falk, dan Sprout namun dalam bentuk analisis yang bersifat lebih *state-centered* dan Realis. Selain berpendapat bahwa perlunya pertimbangan yang lebih dalam kebijakan luar negeri dalam menghadapi efek-efek dari kelangkaan sumberdaya alam dalam kestabilan politik di negara-negara miskin, Matthews juga menekankan bahwa permasalahan lingkungan yang berakibat secara global seperti penipisan lapisan ozon, perubahan iklim, dan deforestasi hutan, harus menjadi isu-isu yang diperhatikan dalam keamanan negara karena merupakan sebab-sebab mendasar dari ketidakstabilan regional. Dan pada empat tahun sebelumnya di tahun 1985, walau tidak terlalu diberitakan, diplomat Amerika Serikat legendaris George Kennan, dalam jurnal yang sama pun telah berargumen bahwa dunia menghadapi ‘dua ancaman yang tak terduga dan sangat hebat’, yakni perang nuklir dan ‘efek merusak dari industrialisasi modern dan overpopulasi terhadap sumberdaya alam dunia’ (Hough, 2015, p. 213).

Banyak pemikir lain yang telah mengaitkan kelangkaan sumberdaya dengan perang, dan sebuah cabang pemikiran dalam literatur perang sumberdaya pun muncul karena secara spesifik berhubungan dengan perubahan iklim. Dupont dan Pearman (dikutip dalam Hough, 2015) misalnya, menyatakan bahwa keadaan bumi yang semakin memanas telah meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik dalam lima cara, yakni:

- Kelangkaan sumberdaya alam;
- Wilayah daratan yang tidak dapat dihuni yang disebabkan oleh kelangkaan air ataupun penggenangan air, salah satunya karena naiknya permukaan air laut;
- Berbagai efek yang disebabkan wabah ataupun bencana alam;
- Pergerakan pengungsi yang lebih besar dari sebelumnya;
- Naiknya persaingan untuk memperebutkan sumber-sumber dari sumberdaya alam yang tersisa.

Dalam sebuah studi empiris oleh *Columbia University*, ditemukan bahwa negara-negara yang dipengaruhi oleh fenomena cuaca ekstrim *El-Nino* dalam rentang tahun 1950 dan 2004 dua kali lebih rentan mengalami konflik sipil berskala besar ataupun konflik internasional (*i.e.* konflik yang menyebabkan lebih dari 25 orang korban jiwa) dibandingkan dengan negara-negara yang tidak terpengaruh oleh *El-Nino* (Hsiang, Meng, & Cane, 2011, p. 440). Contoh kasus yang disorot oleh penelitian tersebut salah satunya memasukkan fakta bahwa ketika Peru terkena imbas *El-Nino* pada tahun 1982, juga terjadi pemberontakan Partai Komunis Peru, *Shining Path*, untuk menggulingkan pemerintahan Peru kala itu. Selain itu, berbagai konflik sipil yang terjadi di Sudan selalu terjadi secara paralel dengan keadaan

cuaca ekstrim yang melanda Sudan. Studi tersebut dapat disimpulkan dalam kalimat sederhana berikut, yakni “ketika panen gagal, orang-orang mengangkat senjata untuk bertahan hidup” (Hough, 2015, p. 214).

Beranjak lebih jauh dari pandangan Realis yang mencoba melebarkan konsep keamanan untuk mencakup permasalahan lingkungan sebelumnya, dimana kepentingan nasional menjadi alasan untuk men-sekuritisasi permasalahan lingkungan, paradigma *Human Security* juga sering digunakan untuk menelaah ancaman yang muncul dari permasalahan lingkungan terhadap manusia. Contoh kasus paling nyata dari bagaimana permasalahan lingkungan dapat menjadi ancaman nyata bagi manusia yakni pada kasus perubahan iklim. Suhu bumi telah tercatat meningkat secara konsisten dalam kurun waktu seabad terakhir, dan diperkirakan akan terus meningkat dengan drastis bila tidak ditangani. Sebab utama dari fenomena pemanasan global ini adalah ‘efek rumah kaca’, yang disebabkan oleh emisi karbon dioksida berlebih dikarenakan meningkat pesatnya pertumbuhan industri di berbagai belahan dunia. Emisi karbon dioksida berlebih tersebut menyebabkan terperangkapnya radiasi inframerah dari cahaya matahari di atmosfer, alih-alih dipantulkan balik oleh permukaan bumi, dimana radiasi inframerah dari sinar matahari yang terperangkap inilah yang menyebabkan naiknya suhu permukaan bumi. Implikasi dari fenomena ini beragam, mencakup meningkatnya fenomena penggurunan atau *desertification*, naiknya tinggi permukaan laut disebabkan oleh melelehnya es kutub, cuaca ekstrem, dan menyebarnya penyakit-penyakit tropis, dimana hal-hal tersebut membawa ancaman bagi kehidupan manusia dalam berbagai bentuk (Hough, 2015, p. 214).

Banyak negara di dunia telah mengadopsi pandangan keamanan yang diperluas, yang mencakup mengenai keamanan lingkungan sejak tahun 1990. Di masa kepemimpinan Presiden Clinton, Amerika Serikat secara ekstensif berkonsultasi dengan *academic advisors* serta menggunakan berbagai literatur ‘keamanan nasional’ yang mulai memerhatikan faktor non-militer sebagai sumber ancaman baru bagi keamanan nasional sebagai rujukan untuk menyusun kebijakan-kebijakan terkait semenjak Soviet runtuh. Hal ini terlihat jelas pada *National Security Strategy* tahun 1994, yang merupakan manifesto kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dimana secara eksplisit menyatakan bahwa permasalahan lingkungan merupakan tantangan yang mulai mengancam stabilitas dunia internasional dan juga memengaruhi strategi kebijakan luar negeri yang dibuat Amerika Serikat. Untuk pemerintahan Amerika Serikat, menjadi ‘si nomor satu’ dalam memahami dan merespon permasalahan lingkungan tidak hanya membantu Amerika Serikat dalam menyikapi isu-isu lingkungan seperti kerusakan lapisan ozon, dan juga untuk menaikkan reputasi Amerika Serikat di mata dunia (Hough, 2015, pp. 215-216).

Uni Soviet juga telah menggunakan ‘kartu hijau’ dalam beberapa kejadian ketika Perang Dingin masih berlangsung. Di dekade 1970-an, Uni Soviet menjadi pionir tak terduga dari undang-undang internasional yang melarang perusakan lingkungan yang disengaja dalam perang, yang kemudian tertuang dalam *Environmental Modification Treaty* tahun 1976 dan *Geneva Conventions Protocol I* tahun 1977. Kritik keras Uni Soviet terhadap penggunaan *Agent Orange*, zat herbisida dan penggugur daun yang dipakai Amerika Serikat dalam Perang Vietnam, merupakan langkah yang mendorong Uni Soviet dalam menjadi pionir untuk undang-undang internasional tersebut (Hough, 2015, p. 216).

Berbagai organisasi antarpemerintah pun telah mengadopsi gagasan untuk men-  
sekuritisasi permasalahan lingkungan sejak 1970-an, dan pandangan tersebut  
semakin bertumbuh subur setelah Perang Dingin berakhir. Dorongan untuk  
bersama-sama memerhatikan keamanan kolektif membawa berbagai negara untuk  
fokus pada ancaman-ancaman yang dibawa oleh *overpopulation*, kerusakan  
lingkungan, dan kelangkaan sumberdaya alam. Pada tahun 2004, *United Nations  
Secretary-General's High-Level Panel on Threats, Challenges, and Change*  
menghasilkan laporan yang didukung oleh pemerintahan berbagai negara di  
*Millenium Review Summit* di tahun berikutnya, dimana laporan tersebut menyajikan  
pandangan baru dari keamanan komprehensif yang menyebut 6 isu utama yang  
harus diperhatikan oleh dunia pada sekarang ini dan dalam beberapa dekade  
kedepan, seperti kemiskinan, penyakit menular, dan kerusakan lingkungan (Hough,  
2015, p. 218).

Permasalahan lingkungan merupakan sebuah tantangan bersama yang tidak  
hanya melibatkan satu negara saja dalam mengatasinya, dikarenakan sifatnya yang  
melintasi batas negara serta terjadi secara global. Berbagai pandangan telah  
mencoba untuk menelaah lebih jauh dari penyebab dan akibat yang ditimbulkan  
oleh permasalahan lingkungan, baik dari sudut pandang keamanan *state-centrist*  
yang telah diperluas sehingga mencakup permasalahan lingkungan sebagai bagian  
dari ancaman terhadap keamanan, ataupun *human security* yang melihat bahwa  
kerusakan lingkungan telah menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan manusia.  
Dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan diperlukan sebuah usaha yang  
tidak hanya bergantung pada *technological quick-fix*, respon reaktif setelah krisis  
lingkungan tertentu terjadi, ataupun tindakan-tindakan politis yang hanya bertujuan

untuk *headline-grabbing* semata, namun juga pada partisipasi dan usaha baik oleh aktor pemerintah dan aktor non-pemerintah untuk bersama-sama melakukan kolaborasi dan mengambil tindakan yang efektif, berangsur, dan teknis untuk mengatasi permasalahan utama penyebab permasalahan lingkungan yang ada.

### **C. Penelitian-Penelitian Sebelumnya dan Perbedaannya dengan Penelitian yang Dilaksanakan**

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, telah ada berbagai penelitian sebelumnya yang terkait dengan *Coral Triangle Initiative* dalam berbagai aspek, seperti penelitian mengenai dimensi sosial dari manajemen perikanan di wilayah *Coral Triangle* ataupun penelitian yang berfokus dalam melihat kohesi antar aktor yang terlibat dan berpartisipasi dalam *Coral Triangle Initiative*. Tentunya masing-masing penelitian telah menghasilkan berbagai kesimpulan berdasarkan kerangka penelitian masing-masing dan turut memperkaya sumber-sumber keilmuan dan literatur yang membahas mengenai *Coral Triangle Initiative* itu sendiri.

Foale et al. (2012) melakukan penelitian mengenai bagaimana pandangan *Coral Triangle Initiative* terhadap ketahanan pangan. Wilayah *Coral Triangle* merupakan sebuah wilayah yang sangat kaya akan keberagaman hayatinya. Terdapat lebih dari 100 juta orang yang hidup di wilayah pesisir pantai dalam kawasan ini bergantung pada kekayaan alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan ratusan juta lainnya mendapatkan sumber makanan bergizi langsung dari wilayah tersebut melalui perdagangan lokal, regional, dan global.

Namun sayangnya keberagaman hayati tersebut dan nilainya bagi masyarakat terancam oleh perubahan demografi dan perubahan habitat, permintaan yang terus

meningkat, pemanenan yang intens, serta perubahan iklim. Bersama-sama dengan berbagai organisasi pemerhati lingkungan serta negara-negara pendonor dana pembangunan, badan-badan pemerintah di enam negara yang ada dalam kawasan ini memutuskan untuk saling bekerjasama dan membentuk *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF)*.

CTI memiliki cita-cita eksplisit dan target-target yang jelas mengenai pelestarian keberagaman hayati kelautan di wilayah tersebut, namun tidak untuk menjamin ketahanan pangan bagi masyarakat yang bergantung terhadap sumberdaya kelautan, walaupun ketahanan pangan juga dijadikan sebagai justifikasi dalam upaya pelestarian tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan dan pendekatan yang digunakan oleh CTI terhadap ketahanan pangan sejauh ini masih sempit dan hubungan antara pelestarian keberagaman hayati dan peningkatan ketahanan pangan masih sering dinyatakan dalam bentuk asumsi belaka dibandingkan disokong oleh argumentasi yang lebih valid.

Penelitian ini menemukan bahwa usaha untuk meningkatkan ketersediaan dan mempertahankan produktivitas sumberdaya laut untuk menjamin ketahanan pangan dalam banyak kasus sulit dipertemukan dengan tujuan CTI yang ingin menjamin konservasi keberagaman hayati, dan menyarankan untuk adanya kompromi dalam pelaksanaan konservasi tersebut. Dengan berfokus pada akses dan komponen-komponen konsumsi dalam ketahanan pangan dibandingkan dengan berfokus pada meningkatkan produksi ataupun jumlah suplai dapat memberikan jangkauan yang lebih luas serta membuka pintu untuk berbagai macam program-program pelengkap untuk usaha-usaha konservasi yang ditujukan untuk menangani ketahanan pangan di berbagai komunitas terkait.

Fielman et al. (2014) meneliti mengenai kohesi antar *stakeholder* yang terlibat dalam CTI. Mengambil data dari 63 *stakeholder* terkait, penelitian ini bertujuan untuk menelaah pandangan dan preferensi kebijakan, pola kolaborasi dan kepercayaan dengan *stakeholder* lain, akses terhadap sumberdaya dan level pengaruh, dan penilaian mereka atas performa keseluruhan dari CTI *circa* 2011.

Penelitian ini menemukan bahwa CTI lebih baik dilihat sebagai sebuah sub-sistem kebijakan kolaboratif yang baru lahir dimana terdapat dukungan yang kuat terhadap tujuan-tujuan CTI dari berbagai *stakeholder* yang ada, konvergensi dalam pandangan dan preferensi kebijakan, dan telah ada berbagai contoh kolaborasi yang dilaksanakan. Namun, beberapa ketegangan dalam sub-sistem kebijakan perlu diperhatikan lebih jauh, dikarenakan hal tersebut berpotensi untuk mengurangi efektifitas dan keberlanjutan jangka panjang dari CTI. Penelitian ini menyarankan bahwa dalam proses pendewasaan CTI diperlukan untuk menjaga konvergensi yang luas dalam pandangan kebijakan untuk mencegah munculnya koalisi-koalisi *adversarial* di dalam tubuh CTI itu sendiri, dan/atau untuk menghindari tindakan-tindakan prioritas unilateral terhadap *global interests* tertentu yang berimbas buruk bagi prioritas lokal dan nasional.

Christie et al. (2016) meneliti dan memeriksa hasil dari *United States Coral Triangle Initiative Support Program* (USCTI) yang terdokumentasi dalam *Learning Project* (LP), sebuah proyek kolaboratif dan interdisipliner yang mencakup *lessons learned* dari USCTI dan CTI. Proses dengan desain kooperatif dan juga bersifat kolaboratif membuat LP dapat mengumpulkan informasi dari berbagai informan yang berasal dari bidang yang berbeda-beda dalam waktu yang

relatif singkat, serta dapat menyediakan dokumentasi yang lengkap mengenai pencapaian-pencapaian serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh USCTI.

Salah satu contohnya, survei-survei sosial pada para pengguna sumberdaya dan para pembuat keputusan di wilayah *Coral Triangle* dan dokumen-dokumen USCTI yang telah dihasilkan selama ini telah menghasilkan hasil-hasil manajemen yang mengagumkan. Hasil-hasil yang dapat dilihat yakni meningkatnya penegakan Kawasan Konservasi Perairan, peningkatan kapasitas manajemen regional dan nasional, pembentukan kepemimpinan, dan perencanaan mengenai konservasi-perikanan-perubahan iklim yang terintegrasi. Namun tantangan-tantangan yang signifikan tetap ada untuk menjamin agar proses perencanaan keseluruhan tetap secara efektif menghubungkan usaha-usaha level regional, level nasional, level sub-nasional, serta level komunitas, dan agar pemberi donor dari dunia internasional dan para pembuat kebijakan, pengelola, dan pengguna sumberdaya di wilayah *Coral Triangle* ini tetap berkomitmen dalam melaksanakan upaya konservasi yang ada.

Suciramdani (2017) sendiri melakukan penelitian yang membahas mengenai upaya CTI-CFF dalam melestarikan terumbu karang di kawasan *Coral Triangle*. Beranggotakan enam negara yang lazim disebut sebagai *Coral Triangle Six* atau CT6, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon, kerjasama internasional ini bertujuan untuk bersama-sama menghadapi tantangan yang mengemuka di kawasan *Coral Triangle* tersebut, salah satunya yakni pelestarian terumbu karang yang menjadi bagian dari fokus-fokus utama yang diperhatikan oleh *Coral Triangle Initiative* itu sendiri. Ancaman terhadap terumbu karang di kawasan ini tidak hanya datang dari perubahan iklim,

namun juga dari *destructive fishing* dan pencemaran dari Daerah Aliran Sungai (DAS), pembangunan wilayah pesisir, dan meningkatnya sedimentasi di daerah pesisir.

Penelitian ini menemukan bahwa CTI-CFF telah melakukan beberapa upaya dalam merespon kerusakan terumbu karang dan untuk melestarikan terumbu karang, di antaranya yakni melakukan konservasi keberagaman hayati, melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan menangani masalah kemiskinan melalui pembangunan ekonomi, membangun ketahanan pangan, dan menciptakan mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.

Linggi (2017) melakukan penelitian mengenai peranan CTI-CFF dalam upaya konservasi terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan di Indonesia. Sebagai negara dengan wilayah laut yang luas, Indonesia tentu menaruh fokus yang tidak sedikit dalam memerhatikan wilayah lautnya. Aktivitas manusia seperti *overfishing*, *destructive fishing*, dan juga ancaman yang muncul dari *global warming* merupakan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam memerhatikan wilayah *Coral Triangle* yang ada di dalam teritori negaranya.

Penelitian ini menemukan bahwa CTI-CFF memiliki peranan penting dalam upaya konservasi terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan di Indonesia. Kerjasama multilateral ini menghasilkan *Regional Plan of Action* yang kemudian diadopsi oleh Indonesia untuk dijadikan rujukan dalam menyusun kebijakan. Selain itu, kerjasama CTI-CFF dengan negara-negara donor dan NGO juga turut membantu melengkapi proses dan perkembangan yang telah dicapai oleh Indonesia sejauh ini.

Tentu selain berbedanya fokus antara satu penelitian dengan penelitian yang lain seperti yang disebutkan sejauh ini, penelitian yang dilaksanakan dalam karya ilmiah skripsi ini memiliki fokus tersendiri yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk mempermudah, maka penulis akan menjabarkan perbedaan tersebut dalam sebuah tabel matriks sederhana di bawah ini:

No	Nama Peneliti	Tahun Terbit	Fokus Penelitian
1	Foale et al.	2012	Menelitik perspektif dan tindakan yang diambil oleh CTI dalam bidang ketahanan pangan
2	Fielman et al.	2014	Meneliti mengenai kohesi antar <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam CTI
3	Christie et al.	2016	Meneliti dan memeriksa hasil dari <i>United States Coral Triangle Initiative Support Program (USCTI)</i> yang terdokumentasi dalam <i>Learning Project (LP)</i> .
4	Suciramdani	2017	Meneliti mengenai upaya yang ditempuh oleh CTI-CFF dalam melestarikan terumbu karang di wilayah <i>Coral Triangle</i>
5	Linggi	2017	Meneliti mengenai peranan CTI-CFF dalam upaya konservasi terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan di Indonesia
6	Anugrah (Penulis)	2019	Meneliti mengenai bentuk-bentuk implementasi hasil kerjasama yang disepakati dalam CTI-CFF yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Filipina dari rentang waktu 2009-2017

**Tabel 2.1: Matriks Perbedaan Fokus Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian Penulis**

**Sumber: Hasil Analisa Penulis**

Berdasarkan matriks tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian yang diangkat oleh penulis lebih berfokus pada implementasi dari hasil kesepakatan CTI-CFF di dalam dua negara anggotanya, yakni Indonesia dan Filipina. Berbeda dari fokus penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menelitik

mengenai bagaimana dua negara dengan lanskap geografis yang sama, yakni Indonesia dan Filipina yang merupakan *archipelagic nation* dan berada di dalam wilayah Segitiga Terumbu Karang, mengimplementasikan hasil kerjasama multilateral dalam bidang kelautan dan perikanan untuk menangani permasalahan lingkungan di wilayah masing-masing.